



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen -	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

No.	Judul Dokumen	Penerbit	Penanggung jawab
1.	Standar Internasional ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu- Persyaratan	Cognoscenti Consulting Group	Top Manajemen
2.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
3.	Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
4.	Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
5.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
6.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
7.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
8.	Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
9.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
10.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
11.	Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
12.	Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	Sekretaris Negara	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
-	04/09/2017	00	04/09/2017

13.	Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
14.	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
15.	Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
16.	Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
17.	Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
18.	Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
19.	Undang-undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Gudang	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
20.	Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
21.	Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
22.	Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
23.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
24.	Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura	Sekretaris Negara	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
-	04/09/2017	00	04/09/2017

25.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
26.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
27.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
28.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
29.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
30.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
31.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Materai dan Besar atas Pengenaan Harga Nominal Yang di Kenakan Bea Meterai ditetapkan di Jakarta tanggal 20 April 2000	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
32.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
33.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
34.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	Sekretaris Negara	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
-	04/09/2017	00	04/09/2017

35.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Desember 2008	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
36.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
37.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
38.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
39.	Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
40.	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah	Menteri Agama RI	Kepaniteraan
41.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik	Menteri Keuangan RI	Kepaniteraan
42.	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak	Menteri Sosial RI	Kepaniteraan
43.	Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kapolri	Kepaniteraan
44.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	MENPAN	Kepaniteraan
45.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi	Menteri Keuangan RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
-	04/09/2017	00	04/09/2017

	Pemerintah		
46.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Sekretaris Negara	Kepaniteraan
47.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan	Menteri Keuangan RI	Kepaniteraan
48.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	Menteri Keuangan RI	Kepaniteraan
49.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja	Menteri Keuangan RI	Kepaniteraan
50.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	Menteri Keuangan RI	Kepaniteraan
51.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 dan Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
52.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
53.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
54.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
55.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
-	04/09/2017	00	04/09/2017

	Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.		
56.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
57.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
58.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
59.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
60.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
61.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di Bawahnya	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
62.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
63.	Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Pekara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
64.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
65.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 97/KMA/SK/X/2006 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
-	04/09/2017	00	04/09/2017

66.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 115/KMA/SK/VII/2007 tentang Sistem Penomoran Berkas Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
67.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
68.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
69.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
70.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
71.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
72.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 97/KMA/SK/X/2012 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
73.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
74.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 096/KMA/SK/X/2016 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
75.	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
76.	Pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan)	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
-	04/09/2017	00	04/09/2017

77.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1962 tentang Pelaksanaan Sita Atas Barang-barang yang Tidak Bergerak Nomor: 690/K/651/M/1962 ditetapkan di Jakarta tanggal 25 April 1962	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
78.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1973 Perkara Kasasi Perdatan Nomor : M.A/Pemb./600/73 ditetapka di Jakarta tanggal 23 Mei 1973	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
79.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan Conservatoir Beslag) Nomor M.A/Pemb./1021/1/75 ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Desember 1975	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
80.	Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Desember 1990.	Badan Administrasi Kepegawaian	Kepaniteraan
81.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat Nomor MA/KUMDIL/01/III/K/2007 di Jakarta 29 Maret 2007	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
82.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/VI/2008	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
83.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2008 tentang Sita Atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank-bank di Bank Indonesia Nomor :08/Bua.6/Hs/SP/IX/2008 ditetapkan di Jakarta tanggal 25 September 2008	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
84.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nomor : 09/Bua.6/Hs/SP/X/2008 ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2008	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
85.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi permohonan Pengangkatan anak dengan Akta Kelahiran Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/II/2009	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
-	04/09/2017	00	04/09/2017

	ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2009		
86.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2009 tentang Penundaan Eksekusi terhadap Putusan Yang BHT Dalam Rangka Menghadapi Pemilu tahun 2009 Nomor: 03/Bua.6/Hs/SP/III/2009 ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2009	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
87.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi Nomor : 01/Bua.6/Hs/SP/II/2010 ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Februari 2010	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
88.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2010 ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Maret 2010	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
89.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Nomor: 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010 ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Agustus 2010	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
90.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan P.K Nomor: 15/BUA.6/HS/SP/XII/2010	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
91.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan P.K Nomor: 01/Bua.6/Hs/SP/I/2017 ditetapkan di Jakarta 29 Januari 2014	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
92.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan Pengadilan Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2014	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
93.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan & Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Nomor: 03/Bua.6/Hs/SP/III/2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2014	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
-	04/09/2017	00	04/09/2017

94.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Nomor: 164/Bua.6/Hs/SP/XII/2014 ditetapkan di Jakarta 30 Desember 2014	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
95.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perma No. 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara & Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung & Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Nomor: 01/Bua.6/Hs/SP/III/2016 ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2016	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
96.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 0377.a/DJA/HM.00/2/2016 tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama	Dirjen Badilag	Kepaniteraan
97.	Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat No. 052/KMA/V/2009 ditetapkan di Jakarta Tanggal 1 Mei 2009	Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan
98.	Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pelaporan Perkara, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo Nomor 0335/DJA/HM.00/II/2013 ditetapkan tanggal 25 Pebruari 2013	Dirjen Badilag	Kepaniteraan